

**EVALUASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA RUANG  
TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SURABAYA  
(Studi Kasus: Taman Bungkul Kota Surabaya)**

**Elsa Regitha Aura Putri**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[elsaregitha01@gmail.com](mailto:elsaregitha01@gmail.com);

**Anggraeny Puspaningtyas**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[anggraenypuspa@untag-sby.ac.id](mailto:anggraenypuspa@untag-sby.ac.id);

**Adi Soesiantoro**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[adi\\_susiantoro@untag-sby.ac.id](mailto:adi_susiantoro@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Proses penataan Pedagang Kaki Lima sering kali dilatarbelakangi oleh banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya yang dapat menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban salah satunya di Taman Bungkul Kota Surabaya. Dalam proses penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk menata Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak dari penataan. Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak dari penataan akan diberikan dan disediakan tempat untuk berjualan kembali pada Sentra Wisata Kuliner Taman Bungkul yang nyaman dan rapi. Namun, meskipun sudah dilakukan relokasi kepada beberapa Pedagang Kaki Lima ke tempat yang lebih nyaman masih ada saja Pedagang Kaki Lima lain yang bermunculan dan membuat ketidaktertiban di pinggir jalan Taman Bungkul Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul Kota Surabaya. Dengan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan dari William N. Dunn, evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima tidak sepenuhnya berhasil karena masih ada Pedagang Kaki Lima yang kembali ke lokasi lama atau di pinggir jalan karena biaya retribusi yang tidak tepat sasaran dengan fasilitas dan penghasilan yang didapatkan.

**Kata kunci:** *Pedagang Kaki Lima, Penataan, Sentra Wisata Kuliner, Evaluasi Kebijakan*

## **A. PENDAHULUAN**

Kota Surabaya menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya memiliki luas sekitar ±335,28 km<sup>2</sup>, dan juga memiliki jumlah penduduk yang mencapai 2.972.801 jiwa pada tahun 2022. Dari segi jumlah penduduk, maka tingkat transportasi pun juga akan bertambah yang dapat menimbulkan populasi yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik yang akan mempengaruhi suhu udara, kelembaban udara, serta radiasi matahari. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 mengatakan bahwa “disetiap 30% wilayah kota wajib menyediakan dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik ataupun private”. Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu kawasan ruang terbuka yang dimanfaatkan untuk tempat melestarikan tanaman atau vegetasi yang berfungsi untuk mempercantik estetika Kota, mengatur iklim, dan sebagai resapan air. Yang termasuk jenis Ruang Terbuka Hijau adalah tepi sungai, pantai, pemakaman umum, jalur sepanjang jalan, dan juga taman kota seperti Taman Bungkul Kota Surabaya.

Taman Kota yang termasuk jenis Ruang Terbuka Hijau telah menjadi suatu alasan keunggulan dan kemajuan suatu Kota dikarenakan keestetikaan, keindahan, dan kebersihan. Di era modern saat ini, suatu Kota perlu diberikan ruang publik bagi masyarakat sebagai tempat bermain dan beristirahat, seperti taman Kota. Taman Kota merupakan taman yang didirikan dengan lahan yang besar dan luas yang berada di dalam lingkungan perkotaan dan dapat dikunjungi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam Kota maupun luar Kota. Taman Bungkul Kota Surabaya merupakan salah satu taman kota yang letaknya strategis berada di tengah kota yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk dijadikan tempat wisata dan edukasi masyarakat umum. Dari berbagai taman kota di Indonesia, Taman Bungkul Kota Surabaya mampu meraih penghargaan tingkat Internasional pada tahun 2013. Penghargaan tersebut diraih untuk kategori Taman Terbaik Se-Asia “The 2013 Asian Townscape Award” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun dibalik prestasi tersebut, Taman Bungkul memiliki letak yang strategis karena berada di tengah Kota Surabaya yang rawan akan kemacetan dan ditambah pula oleh pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan.

Pedagang kaki lima merupakan aktifitas yang memanfaatkan fasilitas umum dan lokasi yang tidak dianjurkan sebagai tempat untuk berjualan seperti trotoar, badan jalan, pedestrian dan emperan toko. Memiliki profesi sebagai Pedagang Kaki Lima tentunya bukan keinginan seseorang, namun mengingat betapa sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan pada saat itu, maka dengan terpaksa mereka berjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan, para pedagang kaki lima membawa dampak bagi masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi yang bertujuan mencari pekerjaan di Kota Surabaya. Ketika masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal maka mau tidak mau mereka harus bekerja di sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima. Salah satu sektor yang mempunyai potensi berkumpulnya pedagang kaki lima yaitu tempat wisata. Salah satunya

adalah Taman Bungkul Kota Surabaya yang berada di pusat kota yaitu di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokomo.

Dari lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Taman Bungkul menjadi salah satu tempat yang strategis untuk pedagang kaki lima karena tingkat pengunjung yang cukup tinggi. Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk memanfaatkan taman kota sebagai tempat sentralisasi kegiatan informal (PKL) dan juga pusat penataan yang bermaksud untuk menata keberadaan pedagang kaki lima tanpa merusak keindahan dan fungsi taman kota. Akan tetapi pedagang kaki lima seringkali menempati taman kota yang mengakibatkan taman kota tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pedagang kaki lima tidak hanya berdagang atau berjualan di atas trotoar saja, melainkan disetiap jalur pejalan kaki, tempat parkir, bahkan diperempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk yang akhirnya menyebabkan kemacetan.

Pemerintah Kota Surabaya akan berupaya mengelola kawasan untuk sektor informal, salah-satunya yaitu dengan cara mengembangkan Sentra Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan konsep Sentra Kuliner atau Wisata Kuliner yang terintegrasi kawasan budidaya diantaranya taman-taman kota di seluruh wilayah Kota Surabaya khususnya Taman Bungkul. Program penataan pedagang kaki lima merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, tertib, dan aman, khususnya di kawasan Taman Bungkul. Penataan pedagang kaki lima adalah upaya pemerintah dalam penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan estetika kota, kepentingan umum, sosial, etika, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut William N. Dunn, bahwa evaluasi menghasilkan suatu gambaran dalam pelaksanaan kebijakan dapat dinilai dari informasi dan sumber yang diperoleh dan diterima langsung dilapangan. Apabila permasalahan dalam suatu kebijakan tidak jelas baik proses awal dari pembuatan kebijakan yang tidak mengenai sasaran dan tujuan yang ditentukan, maka evaluasi yang dapat dijadikan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil dari sasaran dan tujuan suatu kebijakan. Tujuan dari Pemerintah Kota Surabaya dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah untuk melakukan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima sehingga menciptakan keindahan Kota sesuai dengan Peraturan Daerah. Dalam program penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya memiliki sasaran dan tujuan yang telah direncanakan sejak awal untuk dicapai sehingga evaluasi menjadi tolak ukur berjalannya kegiatan untuk mencapai ketepatan tujuan dan sasaran dari program. Menurut William N. Dunn terdapat 6 indikator untuk mengukur evaluasi suatu program, yaitu:

1. Efektivitas

Menurut William N. Dunn, efektivitas berhubungan dengan hasil yang diharapkan dari suatu alternatif dan mencapai sasaran atau tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Efektivitas selalu diukur dari layanan yang diberikan, yang berhubungan dengan pola pikir suatu tindakan. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat dan menilai ketercapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Efisiensi

Menurut William N. Dunn, efisiensi berhubungan dengan suatu upaya yang dibutuhkan atau diperlukan dalam menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang memiliki kesamaan makna dengan rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara usaha dan efektivitas yang umumnya diukur dari persediaan biaya atau ongkos untuk mencapai tujuan tertentu. Efisiensi dapat dinilai atau ditentukan dari suatu perhitungan layanan atau per unit produk.

3. Kecukupan

Menurut William N. Dunn, kecukupan berhubungan dengan suatu tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menimbulkan suatu masalah. Indikator kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan

Menurut William N. Dunn, pemerataan berkenaan dengan pola pikir dalam bertindak secara legal dan sosial yang merujuk pada pemasaran akibat usaha antara kelompok yang tidak sesuai dengan masyarakat. Indikator pemerataan sangat berhubungan dengan pendapat atau rancangan yang saling bersaing yakni keadilan kebijakan untuk memasarkan sumber daya dalam masyarakat.

5. Responsivitas

Menurut William N. Dunn, responsivitas berhubungan dengan kepuasan masyarakat dalam hal kebutuhan, selera atau preferensi, dan nilai suatu kelompok tertentu. Indikator responsivitas sangat penting karena hasil dari analisis dapat memuaskan hasil dari semua indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan belum maksimal apabila masih belum menanggapi kebutuhan aktual dari suatu kelompok yang seharusnya mendapat keuntungan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Menurut William N. Dunn, ketepatan berkenaan dengan suatu tindakan yang diukur dari hasil tindakan tersebut, sebab pernyataan kebijakan tidak hanya berkenaan dengan satu indikator individu tetapi dua atau lebih indikator secara bersamaan. Indikator ketepatan berhubungan pada harga dan nilai dari suatu tujuan program dan anggapan atau asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

Pada 6 indikator tersebut nantinya akan dilakukan analisis data untuk mengetahui sejauh mana program penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya. Serta mengetahui permasalahan yang muncul pada masyarakat untuk menyempurnakan terwujudnya program penataan Pedagang Kaki Lima tersebut.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu proses yang digunakan untuk mendapatkan data, informasi, dan langkah-langkah dalam meneliti terutama mengenai kajian Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya. Dalam metode penelitian akan dijelaskan dan diuraikan mengenai metode pendekatan yang digunakan dalam meneliti, metode pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder, serta metode analisa data yang bertujuan untuk mengolah data dan informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan pada studi yang mengenai “Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya (Studi Kasus Taman Bungkul Kota Surabaya)” adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis ataupun lisan dari perilaku yang dapat diteliti dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan pendekatan deskriptif pada penelitian ini berarti mendeskripsikan bagaimana penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang kemudian dianalisis dan dibandingkan secara menyeluruh, luas, dan mendalam berdasarkan kenyataan secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

Peneliti akan menggunakan jenis data kualitatif dalam proses penelitian ini, yakni data yang berkaitan dengan objek dan fokus penelitian yang sedang diamati. Peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data atau sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek yang dapat dipercaya seperti subjek penelitian atau informan yang memberikan informasi nyata yang berkenaan dengan apa yang sedang diteliti berupa bentuk verbal atau kata-kata yang disampaikan secara lisan oleh responden atau informan secara langsung. Dalam memperoleh hasil dari data primer, peneliti harus mengumpulkan hasil data dengan menggunakan cara observasi lapangan dan wawancara secara langsung dari sumber data.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan bahwa data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh dinas/instansi terkait, diantaranya berupa gambaran kawasan Taman Bungkul di Kota Surabaya.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada pembahasan ini berisi tentang penjelasan dari data-data dan informasi yang di peroleh dari lapangan yang mengarah pada pemecahan masalah. Hasil dari penyajian data di analisis menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh William N Dunn yang terdiri dari beberapa indicator, sebagai berikut:

### **Efektivitas**

Efektivitas yang dimaksudkan adalah sebagaimana suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kuantitas, kualitas dan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima telah tercapai. Berdasarkan penyajian data mendapatkan hasil bahwa penerapan program penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik, karena Pemerintah sudah berupaya untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima ke dalam Sentra yang nyaman dan permanen meskipun kapasitas Sentra tidak dapat menampung seluruh Pedagang Kaki Lima yang berada di pinggir jalan Taman Bungkul. Sehingga tidak dapat dipungkiri masih banyak Pedagang Kaki Lima yang bermunculan dan berjualan dipinggir jalan, karena pengunjung di Taman Bungkul selalu ramai dan tidak pernah sepi membuat para Pedagang Kaki Lima bergegas dan bersemangat untuk berjualan.

### **Efisiensi**

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan serta hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan. Berdasarkan penyajian memperoleh hasil bahwa sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang digunakan untuk melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima di SWK Taman Bungkul seperti tempat relokasi yang digunakan sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat berjualan yang nyaman dan rapi serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah seperti stan, gerobak, meja dan kursi maka mereka harus terdata dan segera mengurus syarat-syarat untuk memiliki stan di SWK tersebut.

### **Kecukupan**

Kecukupan yang dimaksud yaitu seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Berdasarkan penyajian data memperoleh hasil bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh Pemerintah dalam program penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya sudah cukup untuk mengurangi masalah. Karena dengan adanya kebiakan-kebijakan tersebut maka penataan Pedagang Kaki Lima akan berjalan tertib dan sesuai keinginan masyarakat. Dengan begitu para petugas Satpol PP akan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai amanat dan kebijakan supaya para PKL akan ditata dengan baik dan mentaati peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, ya meskipun masih ada Pedagang Kaki Lima yang nakal dan membuat para pedagang di Sentra merasa dicurangi.

### **Perataan**

Perataan merupakan hal yang berkenaan dengan implementasi kebijakan terhadap masyarakat atau sasaran kebijakan itu tercapai, apakah penerapan kebijakan atau suatu program diberlakukan merata kepada seluruh Pedagang Kaki Lima atau hanya kepada Pedagang Kaki Lima tertentu. Berdasarkan penyajian data memperoleh hasil bahwa terkait kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya dalam pelaksanaannya berjalan secara merata. Sasaran kebijakan ini adalah Pedagang Kaki Lima yang merupakan warga asli Kota Surabaya, karena untuk para Pedagang Kaki Lima yang di relokasi hanya

diutamakan dan dikhususkan bagi warga Kota Surabaya, jika warga di luar Kota Surabaya maka tidak diperbolehkan untuk berjualan di area Sentra. Tata cara atau syarat-syarat permohonan Izin Pemakaian Sentra adalah warga Kota Surabaya dengan menunjukkan identitas foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, pas foto ukuran 4x6 terbaru sebanyak 2 lembar, rekomendasi dari Camat setempat, surat pernyataan bermaterai cukup.

### **Responsivitas**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh saat kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan penyajian data memperoleh hasil bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di pinggir jalan atau trotoar Taman Bungkul tidak terlalu mengganggu karena semua orang hidup secara berdampingan asalkan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban, dan tidak berjualan di pedestrian atau di jalan protokol karena tidak diperbolehkan. Karena dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima di pinggir jalan maupun di Sentra Taman Bungkul maka semakin banyak pula pengunjung yang berdatangan. Tetapi keberadaan Pedagang Kaki Lima di pinggir jalan telah mengganggu pendapatan pedagang yang ada di Sentra, secara Pedagang Kaki Lima tidak menetap berjualan di area Taman Bungkul saja tetapi juga berpindah-pindah tempat sehingga mereka mendapatkan banyak konsumen. Mereka berharap dengan adanya penataan Pedagang Kaki Lima dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan penghasilan pedagang di Sentra. Apabila terdapat Pedagang Kaki Lima di pinggir jalan maupun di Sentra melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan teguran atau SP hingga sanksi dan berujung dikeluarkan atau digusur dari area Taman Bungkul Kota Surabaya jika tidak menerapkannya. Namun untuk Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan protokol atau pedestrian akan mendapatkan peringatan, jika tidak bisa diingatkan maka akan dikenakan sanksi dengan dimintai keterangan kemudian KTP akan diambil dan diberi surat tilang.

### **Ketepatan**

Ketepatan dalam hal ini dapat dikatakan tercapai apabila sesuai dengan kebutuhan obyek, nilai-nilai yang didapatkan, sasaran yang sesuai, dan kesempatan para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketepatan. Berdasarkan penyajian data memperoleh hasil bahwa Pemerintah telah meniadakan biaya retribusi bagi pedagang di SWK Taman Bungkul Kota Surabaya guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan karna biaya retribusi tidak tepat sasaran sesuai dengan pendapatan pedagang di Sentra. Sehingga para pedagang di Sentra hanya membayar biaya listrik dan air masing-masing serta kebersihan di setiap stan Sentra Wisata Kuliner. Sedangkan untuk jam operasional para pedagang menyesuaikan dagangan masing-masing.

Pada evaluasi penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya perlu melakukan pelaksanaan sosialisasi program penataan yang berkelanjutan. Hal tersebut untuk meingkatkan kesadaran bagi Pedagang Kaki Lima yang ada di pinggir jalan maupun di Sentra akan pentingnya ketertiban dan kebersihan. Semakin meningkatkan kesadaran para Pedagang Kaki Lima dalam

penataan maka dapat meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keamanan di kawasan Taman Bungkul Kota Surabaya.

#### **E. PENUTUPAN**

Proses penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan proses penataan hanya sebatas dalam menempatkan Pedagang Kaki Lima ke tempat yang lebih nyaman dan bersih serta mengurangi jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak tepat pada tempatnya seperti di pinggi jalan protokol atau pedestrian. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan banyaknya pengunjung Taman Bungkul yang selalu ramai dan tidak pernah sepi membuat para Pedagang Kaki Lima berdatangan setiap harinya yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang terjadi yaitu kemacetan lalu lintas, ketertiban, dan kebersihan Kota. Dalam penataan yang dilakukan Pemerintah Kota dengan tujuan membuat para Pedagang Kaki Lima yang semulanya adalah sektor informal dapat menjadi pedagang formal pada Sentra Wisata Kuliner dengan syarat utama yaitu warga Kota Surabaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur. *Publika*, 241–254. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p241-254>
- Irmadella, A. (2018). Model Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–11.
- Yuliasari, I. (2016). Profil Pedagang Kaki Lima Dan Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. *Sosio E-Kons*, 8(2).
- Putra, F. A. (2018). *Keterkaitan Antara Kualitas Pedagang Kaki Lima Dengan Kualitas Taman di Taman Bungkul Kota Surabaya*. Universitas Brawijaya.
- Pratiwi, S. E., & Nawangsari, E. R. (2018). Evaluasi Dampak Pembangunan Rumah Majapahit Bagi Masyarakat Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).